

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana penerapan SPIP dapat mempengaruhi PAD dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara menyeluruh, beberapa kesimpulan utama yang diperoleh ialah:

1. Telah dibuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan kontribusi yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan pentingnya penerapan pengendalian internal yang efektif berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah diarahkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai berkontribusi secara positif seklaigus signifikan terhadap laju pertumbuhan

ekonomi, sekaligus mengindikasikan bahwa pengelolaan yang efektif tak hanya memperkuat efisiensi fiskal, melainkan juga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi secara langsung.

4. Pendapatan asli daerah terbukti memediasi sebagian hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dengan memediasi secara parsial. Hasil dari uji Barron dan Kenny, serta uji Sobel, juga mengonfirmasi bahwa sebagian pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi disalurkan melalui peningkatan pendapatan asli daerah, sementara sebagian lainnya tetap berjalan secara langsung.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa penguatan pengendalian internal pemerintah menjadi instrumen penting dalam mendorong kinerja fiskal yang dalam hal ini pendapatan asli daerah dan juga pada pembangunan atau pertumbuhan ekonomi daerah.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara tata kelola keuangan daerah dan pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks teori keagenan. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa sistem pengendalian internal pemerintah sebagai mekanisme pengendalian internal dapat menurunkan permasalahan keagenan yang ada seperti

asimetri informasi dan moral hazard mendorong pemerintah daerah, selaku agen, untuk bertindak sejalan dengan kepentingan masyarakat yang berperan sebagai prinsipal. Pengaruh yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat langsung maupun melalui jalur tidak langsung menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memainkan peran penting sebagai perangkat tata kelola yang memperkuat efektivitas administrasi daerah.

Di samping itu, keberadaan pendapatan asli daerah sebagai variabel mediasi memperjelas hubungan antara kualitas pengendalian internal dan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

## 2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah secara menyeluruh. Berkat penerapan upaya peningkatan pengendalian internal, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan akan memberikan dampak positif tidak hanya pada peningkatan pendapatan asli daerah tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah tidak seharusnya hanya dianggap sebagai kepatuhan administratif saja, melainkan sebagai strategi pembangunan yang berdampak luas dan jangka

panjang. Pemerintah pusat dan BPKP juga dapat mengambil peran dalam memberikan bantuan dan evaluasi terkait sistem pengendalian internal pemerintah secara lebih aktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih nyata oleh masyarakat daerah.

### C. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi catatan untuk penelitian selanjutnya :

1. Data panel terbatas pada 35 pemerintah daerah dengan rentang waktu empat tahun 2019-2023, sehingga hasil temuan tidak mewakili dan dapat digeneralisasi ke wilayah lain di Indonesia.
2. Variabel yang diteliti terbatas pada sistem pengendalian internal pemerintah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan faktor lain yang juga berpengaruh tidak dianalisis.
3. Pengujian menggunakan metode klasik yaitu Barron dan Kenny dan Uji Sobel. Penggunaan metode lainnya yang lebih baru seperti bootstrap atau pendekatan SEM mungkin dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan robust terhadap efek mediasi.